

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian suatu Negara tidak lepas dari peranan lembaga keuangan yaitu perbankan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Kendala utama di era sekarang dalam berbagai kegiatan masyarakat yaitu permasalahan ekonomi, berbagai macam kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangat terbatas, sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan ini.

Untuk membangun infrastruktur baru dan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada dibutuhkan perusahaan konstruksi (kontraktor) yang sudah memiliki pengalaman untuk menyelesaikan suatu proyek. Proyek infrastruktur yang ada saat ini cukup banyak dengan nilai proyek yang besar. Sebagian proyek besar pemerintah hanya dapat dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi berskala besar, beberapa proyek hanya dapat dikerjakan oleh pihak asing seperti dalam usaha pertambangan. Perusahaan Jasa Konstruksi dalam negeri mengalami kendala dalam pengerjaan proyek tersebut karena terbatas sarana usaha dan kekurangan modal

kerja. Peran lembaga keuangan disini dibutuhkan untuk memenuhi terbatasnya sarana usaha dan modal kerja tersebut.

Lembaga keuangan salah satunya yang mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat adalah bank. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai *financial intermediary* (Budisantoso, 2013:9). Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Proses kegiatan bank diawasi langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral.

Kegiatan bank dalam praktiknya juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Kelebihan dana mempunyai arti yaitu masyarakat yang mempunyai dana lebih dan memilih disimpan di bank, kemudian dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank salah satunya yaitu dengan program kredit. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Keberadaan kredit ini bagi para pelaku usaha sangat membantu, mengingat tidak semua pelaku usaha yang ada di Indonesia memiliki harta atau aset dalam jumlah yang besar sebagai modal untuk memulai usaha. Akan tetapi sebagian besar memulainya dari nol atau sampai tanpa menggunakan modal usaha sehingga hal-hal yang demikian perlu mendapat bantuan agar dapat produktif dan mengembangkan roda perekonomian. Sebagai salah satu pelaku usaha yang ada dalam masyarakat, pemborong adalah satu pihak yang tersentuh dengan kredit.

Bentuk badan usaha yang dibuat oleh pemborong dalam bentuk Usaha Dagang (UD) dan Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Venootschaap* (CV) merupakan badan usaha yang paling memerlukan dana. Sementara bentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) relatif lebih mampu dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Perseroan Terbatas (PT) untuk mendapatkan kredit, mengingat nilai pekerjaannya yang lebih besar dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

PD. BPR Artha Galunggung dengan melihat pada perkembangan zaman seperti saat ini, dimana masih membutuhkan pembangunan di berbagai bidang dalam jumlah yang besar, melihat jasa konstruksi masih dapat berkembang dan merupakan peluang pasar bagi BPR untuk meningkatkan jasa kreditnya. Oleh karena itu BPR mengembangkan fungsi perbankannya dengan memberi kredit bagi

kontraktor yang mengadakan perjanjian pemborongan, yaitu melalui Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat.

Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang sangat pesat akan pembangunan infrastruktur, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur publik yang gencar dilakukan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah memerlukan bantuan pemborong sebagai pelaksana di lapangan. Tentunya pembangunan yang dilakukan oleh pemborong ini tidak terlepas dari bantuan dana bank atau modal kerja dari bank. Dengan keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir dengan judul “**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI PADA PD. BPR ARTHA GALUNGGUNG KANTOR PUSAT TASIKMALAYA**”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dokumen persyaratan dalam pemberian kredit modal konstruksi dan prosedur dalam pemberian kredit modal kerja konstruksi serta hambatan dan solusi yang terjadi pada PD. BPR Artha Galunggung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun penulis, maka indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa syarat dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya
2. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya

3. Apa hambatan yang terjadi dalam pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya
4. Bagaimana solusi yang diberikan atas hambatan yang terjadi dalam pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya adalah untuk mengetahui:

1. Syarat dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung.
2. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung.
3. Hambatan yang dialami dalam pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung.
4. Solusi yang diberikan atas hambatan yang terjadi dalam pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi PD. BPR Artha Galunggung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil pembahasan tugas akhir ini selain dapat memberikan penambahan ilmu juga dapat membantu memecahkan permasalahan dan mempunyai manfaat lain yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penulisan tugas akhir selanjutnya yang lebih mendalam, terutama mengenai prosedur pemberian kredit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PD. BPR Artha Galunggung

Bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pemberian kredit modal kerja konstruksi yang tepat.

b. Bagi Universitas Siliwangi

Sarana menambah pengetahuan serta menambah informasi pembaca khususnya bagi mahasiswa program studi Perbankan dan Keuangan

c. Bagi Penulis

Sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh pada saat perkuliahan kemudian diaplikasikan ke dalam dunia kerja dan menjadi sumber masukan serta informasi untuk penelitian yang lebih mendalam.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya Jl. Siliwangi No.12, Tugujaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada saat Kegiatan Magang yang dimulai dari tanggal 22 Desember 2021 sampai 01 Februari 2022. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pelaksanaan Magang																					
2	Ujian Laporan Magang																					
3	Pengajuan Judul TA																					
4	Penyusunan Naskah TA																					
5	Bimbingan Tugas Akhir																					
6	Sidang Tugas Akhir																					

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis